

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) karena permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan bersama. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005). Masalah anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangatlah rentan terhadap situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang tidak kondusif di jalanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak. Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa angka anak jalanan terus

meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 5,4 juta orang. Meski demikian, Kementerian Sosial RI menegaskan bahwa akhir tahun 2014 ini Indonesia akan bebas dari masalah anak jalanan. Sejak tahun 2011 Kementerian Sosial RI telah melakukan penanganan sekitar 80 persen anak jalanan. Artinya saat ini masih tersisa 20 persen lagi anak jalanan yang belum tertangani. Untuk menuntaskan anak terlantar ini diperlukan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu diharapkan Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dapat mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani masalah anak terlantar (Departemen Sosial RI, 2004).

Data yang didapat dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, jumlah anjal di Jakarta makin meningkat. Tahun 2011, tercatat jumlah anjal mencapai 7.315 orang dibanding tahun 2010 yang mencapai 5.650 orang atau tahun 2009 sebanyak 3.724 orang. Mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1 dan parkir liar. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan mengatakan, secara umum peningkatan anak jalanan di Jakarta bukan karena kondisi Jakarta yang kian memburuk, namun karena kondisi di luar Jakarta kurang beruntung bagi mereka sehingga mereka datang ke Jakarta, itu yang terjadi. Dijelaskan Fadjar, keberadaan mereka di jalan beresiko mengalami keterlantaran, eksploitasi, tindak kekerasan, serta kecelakaan lalu lintas. Di Jakarta sendiri jumlah anjal dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan (Inilah, 2011).

Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia, tidak luput dari keberadaan anak jalanan. Pemetaan yang dilakukan oleh Kanwil Departemen Sosial Jawa Tengah (1999) mencatat ada

sekitar 1500 anak. Sumber lain memperkirakan sekitar 2,000 anak jalanan (Tabloid Manunggal, edisi V/Thn XVII/April-Mei 1998). Sebelum krisis terjadi, PAJS (1997) memperkirakan ada 700 anak. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah hampir 200% setelah adanya krisis. Berbagai penelitian, laporan program, hasil monitoring dan pemberitaan media massa telah banyak mengungkap situasi buruk yang dialami oleh anak jalanan Semarang. Monitoring PAJS (1997) di kawasan Tugu Muda pada periode Juli-Desember 1996, mencatat dari 22 kasus kekerasan terhadap anak jalanan 19 kasus (86,3%) dilakukan oleh petugas keamanan (kepolisian, Satpol PP, dan TNI) yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap mereka. Selain kasus kekerasan yang dialami secara personal, kekerasan terhadap komunitas juga kerap terjadi. Warga Semarang mungkin masih teringat kasus penyerangan dan pengrusakan rumah singgah di kawasan Lemah Gempal pada tahun 1997 oleh sekelompok orang tak dikenal yang disusul dengan teror-teror terhadap anak jalanan (Info Jalanan, edisi khusus, September 1997). Setelah mengalami nasib buruk, anak-anak jalanan yang terhimpun dalam PAJS kembali menjadi korban kekerasan oleh negara melalui pernyataan pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang yang melarang PAJS untuk beraktivitas karena dianggap organisasi liar (Wawasan, 4 April 1998). Kasus yang baru saja terjadi adalah pengusiran anak-anak jalanan dari rumah singgah oleh ketua LSM pengelolanya sendiri dan penyerangan sekelompok orang terhadap anak jalanan di Manggala di mana dua anak perempuan menjadi korban perkosaan kelompok tersebut (Yayasan Setara, 2000).

Bali juga tak luput dari anak jalanan. Dinas Sosial Provinsi Bali mengakui upaya untuk mengurangi anak terlantar di Bali terus dilakukan. Salah satu upaya adalah dengan menggandeng panti asuhan di seluruh Bali untuk menampung

sekaligus membantu biaya pendidikan. Dinas Sosial mengakui masalah sosial anak-anak di Bali sangat komprehensif dan memerlukan solusi yang komprehensif pula. Data Dinas Sosial Provinsi Bali tahun 2011 lalu menyebutkan jumlah anak terlantar 18.137 orang, anak nakal 263 orang dan anak jalanan 102 orang.

Di kota Medan dan sekitarnya, jumlah anak yang berada di jalanan, menurut perkiraan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara, mencapai 400-an orang dan kondisinya semakin memprihatinkan, rata-rata dari mereka menjadi pengemis, pengamen atau menggelandang, dari hari ke hari jumlahnya cenderung bertambah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak berada di jalanan, antara lain, karena *broken home* atau rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, bisa juga karena faktor kemiskinan. Persoalan ini makin bertambah parah dikarenakan cara-cara pemerintah dalam menangani anak jalanan masih reaktif dan represif. Reaktif, karena melihat persoalan anak jalanan sebagai perusak keindahan perkotaan dan pelaku kriminal. Sedang sikap represif diperlihatkan dalam bentuk penanganan anak jalanan melalui razia, tangkap dan ceramahi (Waspada, 2/3/2010).

Menurut Kepala Dinas Sosial DIY Sulistyono saat ini jumlah anak jalanan yang berasal dari DIY yang terdata di Dinas Sosial mencapai 400 anak. Sementara yang berasal dari luar DIY diperkirakan jauh lebih banyak. Angka itu adalah yang terdata, sementara yang tidak terdata jauh lebih banyak. Jumlah itu pun jauh lebih kecil dibanding jumlah anak jalanan dari DIY yang terdata tahun lalu yang mencapai seribu anak. Turunnya jumlah anak jalanan di DIY itu karena dinas sosial telah menerapkan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) berupa pemberian dana kesejahteraan bagi anak jalanan. Program ini pengelolaannya berada di tangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Selain

menjalankan program Kesejahteraan Sosial Anak, untuk mengurangi jumlah anak yang berkeliaran di jalanan, Dinas Sosial DIY juga menyediakan rumah singgah. Setidaknya saat ini ada 10 rumah singgah bagi anak jalanan di seluruh DIY. Satu di antaranya rumah singgah terpadu di kawasan Sewon Bantul yang menempati areal lahan seluas 7.000 meter persegi (Kompas, 11/4/2011).

Bagi anak-anak, jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembang karena jalanan lebih banyak memberikan hal negatif dibandingkan hal positif (Suteja, 2012). Resiko yang mereka alami di jalanan adalah penyiksaan fisik, kecelakaan lalu lintas, ditangkap polisi, korban keja hatan, penggunaan obat, konflik dengan anak-anak jalanan lain, dan terlibat dalam pelanggaran hukum baik sengaja ataupun tidak (Agustian dan Prasadja, 2000).

Gambaran tersebut mengenai tindakan agresi yang pernah dilakukan juga diperkuat hasil observasi yang peneliti lakukan di dalam bus umum perjalanan dari Jogjakarta menuju Solo, di perjalanan ada sekitar 3 kali orang mengamen. Pengamen pertama seorang laki-laki usianya mungkin sekitar 20an menyanyikan lagu berbahasa jawa yang isinya seperti sumpah serapah bagi penumpang yang tidak memberi uang kepadanya dan saat meminta uang jika tidak dikasih dia mengejek penumpang tersebut. Pengamen kedua seorang anak laki-laki kira-kira masih usia sekolah menengah pertama namun dandanannya terlihat seperti preman dengan menggunakan anting, setelah selesai membawakan sebuah lagu dia meminta uang pada setiap penumpang dan jika tidak dikasih dia memaksa dalam bahasa jawa. Sedangkan pengamen ketiga dia seorang ibu-ibu yang menggendong anak kecil, selesai membawakan lagu ibu itu meminta uang kepada setiap penumpang namun jika ada yang tidak memberi uang ibu itu diam saja dan tidak memaksa. Selain dari observasi peneliti juga melakukan interview kepada

seorang pedagang buku di daerah Shopping Jogjakarta, kata salah satu seorang pedagang buku disana terkadang ada seorang pengemis anak kecil yang suka memaksa orang saat mengemis, biasanya dia jika tidak dikasih uang akan terus meminta sampai dikasih, sempat saat itu pengemis anak tersebut diusir oleh penjaga toko buku karena mengganggu pelanggan disana. Selain itu wawancara juga dilakukan oleh peneliti dengan seorang ibu-ibu yang duduk disampingnya saat di dalam bus, kata ibu itu kaku pergi sebaiknya menyiapkan uang receh karena ibu itu pernah saat berhenti di lampu merah ada pengamen yang tidak dikasih uang karena tidak ada uang receh malah membaret mobilnya, penampilanya seperti preman dan itu terjadi sudah beberapa tahun yang lalu.

Perilaku agresivitas yang dilakukan oleh anak jalanan terpengaruh oleh lingkungan yang mayoritas berperilaku negative. Agresivitas yang sering dilakukan anak jalanan seperti berteriak, menghina, mengumpat, berkata-kata kotor, tidak mau berkomentar, menendang, memukul, membuat perangkap untuk orang lain dan mendorong. Di lingkungan jalanan, anak-anak belajar tentang kerasnya hidup sehingga membentuk kepribadian yang kurang baik. Mengumpat dan berkata-kata kotor sudah merupakan hal biasa bagi anak jalanan, karena setiap harinya mereka melakukan itu tanpa ada rasa bersalah ataupun penyesalan saat mengucapkan atau melakukannya. Perilaku agresi pada anak jalanan terbentuk karena lingkungan (Sarwono, 2002).

Perilaku agresi itu sendiri menurut Baron (2004) adalah tingkah laku yang ditunjukkan untuk melukai dan mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Lebih lanjut agresi merupakan tingkah laku kekerasan baik secara verbal maupun fisik terhadap individu maupun objek lain yang ditujukan untuk melukai atau mencelakai (Sobur, 2003).

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UU tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Rumah singgah merupakan model penanganan anak jalanan sebagai perwujudan dari UU tersebut (Krismiyarsi dkk, 2004).

Munajat (2001) menjelaskan rumah singgah merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah anak jalanan. Rumah singgah adalah suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Tujuan umum diselenggarakannya rumah singgah adalah membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan khusus rumah singgah antara lain: (1) membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, (2) mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau di panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan dan (3) memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak.

Rumah Singgah memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat pertemuan, pusat asesmen dan rujukan, fasilitator, rehabilitasi-kuratif, perlindungan, pusat informasi, akses terhadap pelayanan, dan resosialisasi. Sehingga anak jalanan yang

tinggal di rumah singgah diharapkan perilaku semakin baik dan perilaku agresif yang dimiliki anak jalanan akan semakin berkurang.

Untuk mengetahui keberfungsian rumah singgah maka dapat dilihat dari segi proses maupun hasil proses rumah singgah, salah satunya yaitu dengan melihat penilaian anak jalanan terhadap pelayanan rumah singgah dan perilaku anak jalanan setelah mendapat layanan rumah singgah. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian evaluatif mengenai penilaian anak jalanan terhadap pelayanan rumah singgah dan hubungannya dengan perilaku mereka perlu dilakukan.

Gambaran tentang realita di atas peneliti beranggapan bahwa persoalan anak jalanan tidak bisa dituntaskan secara cepat sebab selalu ada kapan saja. Namun anak-anak jalanan juga memiliki hak-hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak; diantaranya adalah makanan yang seimbang, layanan kesehatan dan sebuah tempat tinggal yang hangat dan bersih. Mereka memiliki hak untuk bermain dan belajar, memiliki akses pendidikan dan tempat rekreasi yang aman. Mereka juga memiliki hak untuk bebas dari penganiayaan, pengabaian, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak-hak tersebut merupakan hak dasar adalah suatu tindakan bijaksana untuk memberikan yang terbaik kepada anak dan bukan hanya hak-hak dasar saja. Salah satu cara yang efektif adalah menyediakan rumah rehabilitasi bagi anak-anak jalanan.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, maka permasalahan didalam penelitian ini adalah: Bagaimana hubungan antara kesejahteraan rumah singgah dengan agresivitas anak jalanan ?

Peneliti membatasi penelitian pada agresivitas anak pada usia 6-18 tahun. Selain batasan usia tersebut, penulis membatasi penelitian pada anak jalanan yang

merupakan anak asuh dari rumah singgah Yayasan Girlan Nusantara. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan memperoleh hasil yang cermat

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara kesejahteraan rumah singgah dengan agresivitas pada anak jalanan.
2. Tingkat kesejahteraan anak jalanan pada rumah singgah Yayasan Girlan Nusantara Yogyakarta.
3. Tingkat agresivitas anak jalanan di rumah singgah Yayasan Girlan Nusantara Yogyakarta.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah teoritis khususnya dalam bidang psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran tentang sikap agresivitas dan resiko dari sikap agresivitas tersebut, juga dapat menjadi media bagi subjek menyuarakan pendapatnya tentang kesejahteraan di rumah singgah.

b. Bagi Rumah Singgah.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan model pembinaan terhadap anak jalanan melalui Rumah Singgah, sebagai model pembinaan yang diterapkan selama ini.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang masalah kesejahteraan di rumah singgah dan hubungannya dengan agresivitas terhadap anak jalanan.